



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) RESES KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI MALUKU
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 6—10 DESEMBER 2024

=====

Komisi X DPR RI melakukan Kunker Reses ke Provinsi Maluku pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 dipimpin oleh H. Lalu Hardian Irfani, S.T. selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menggali dan menyerap aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat Maluku, serta pengawasan implementasi kebijakan Pemerintah. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan berupa data–data faktual dan permasalahan atas implementasi kebijakan–kebijakan terkait bidang Komisi X.

Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI diterima langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi Maluku Ir. Sadali IE, M.Si., IPU dalam pertemuan di kantor gubernur Provinsi Maluku yang dihadiri oleh perwakilan DPRD Provinsi Maluku, kepala dinas terkait, dan para pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, sains, olahraga, pemuda, dan perpustakaan. Selanjutnya dilakukan pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku dan BPS tingkat daerah se-Provinsi Maluku. Tim Kunker Reses Komisi X didampingi juga oleh perwakilan pejabat dari seluruh mitra kerja Komisi X DPR RI.

Selain pertemuan dengan pemangku kepentingan, Tim Kunker Reses Komisi X juga melakukan kunjungan lapangan ke beberapa satuan pendidikan di Provinsi Maluku. Dalam pertemuan dan peninjauan dilakukan dialog antara Tim Kunker Reses Komisi X dengan para pemangku kepentingan. Diantara permasalahan yang mengemuka yang disampaikan oleh pemangku kepentingan yaitu: (1) kebutuhan guru di Provinsi Maluku sebanyak 2.582 orang, (2) persebaran jumlah sekolah yang belum merata menyebabkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) belum optimal, (3) sarana listrik dan internet yang masih kurang pada daerah 3T sehingga menghambat proses belajar mengajar, (4) kuota KIP kuliah di Provinsi Maluku jumlahnya masih sangat sedikit, (5) sarana dan prasana olahraga belum memadai, (6) masih kurangnya jumlah buku di perpustakaan daerah (fisik dan *e-book*), (7) gedung dan sarana serta prasana yang tidak memadai, (8) BPS Kabupaten Maluku Barat Daya belum memiliki kantor, (9) industri besar tidak mau memberikan data dalam sensus ekonomi yang dilakukan oleh BPS provinsi dan dan BPS daerah.

Berbagai permasalahan, temuan, dan usulan selama Kunker Reses ke Provinsi Maluku akan menjadi bahan untuk dilakukan pembahasan dalam rapat–rapat Komisi X DPR RI bersama Pemerintah.

Ambon, 10 Desember 2024

Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Maluku